

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Madiun**

##### **2.1.1 Sejarah Kota Madiun**

Terbentuknya Pemerintah Kota Madiun dapat ditelusuri dari berbagai peninggalan sejarah, seperti benda-benda, adat istiadat, dan lembaga-lembaga yang ada. Di wilayah Kota Madiun, terdapat dua kelurahan, yaitu Taman dan Kuncen, yang pada masa Kesultanan Mataram berstatus sebagai tanah pardikan, yakni daerah yang memiliki kebebasan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Sebelum masa Kesultanan Mataram, tepatnya pada akhir masa pemerintahan Majapahit, di bagian selatan Madiun berdiri sebuah kerajaan atau pemerintahan yang dikenal dengan nama Gagelang, yang didirikan oleh Adipati Gugur, putra terakhir Brawijaya. Seiring waktu, pusat pemerintahan bergeser ke utara, tepatnya di tepi Bengawan Madiun, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kelurahan Demangan, yang dahulu disebut Kutho Miring. Kemudian, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke wilayah yang kini menjadi kompleks Rumah Dinas Bupati Madiun.

Saat pemerintahan Kutho Miring berlangsung, terjadi pemberontakan di wilayah Sawo, Ponorogo, terhadap Kerajaan Mataram. Bupati Madiun, yang kala itu menyandang gelar Ronggo dan bertugas sebagai Bupati Mancanegara Timur, diberikan tanggung jawab untuk menumpas pemberontakan tersebut karena wilayah kerjanya juga meliputi Sawo, Ponorogo.

Pada masa kepemimpinan Ronggo Prawirodirdjo II, lahirlah pahlawan nasional dari Madiun yang bertugas sebagai panglima perang Pangeran Diponegoro, yakni Ali Basah Sentot Prawirodirdjo. Sebelum pecahnya Perang Diponegoro, wilayah Madiun belum tersentuh oleh bangsa Belanda atau bangsa Eropa lainnya. Namun, setelah perang tersebut berakhir, Belanda mulai menyadari potensi wilayah Madiun, dan pada 1 Januari 1832, Madiun resmi berada di bawah kendali Pemerintahan Hindia Belanda, dengan status pemerintahan Karesidenan yang berpusat di Desa Kartoharjo, dekat istana Kabupaten Madiun di Desa Pangongangan.

Sejak saat itu, banyak orang Belanda dan Eropa lainnya yang datang ke Madiun, terutama mereka yang bergerak di sektor perkebunan dan industri. Mereka mulai mendirikan perkebunan teh di Jamus dan Dungus, perkebunan kopi di Kandangan, dan perkebunan tembakau di Pilangkenceng. Para pendatang ini kemudian menetap di dalam kota, terutama di sekitar Istana Residen Madiun, dan berusaha menerapkan segregasi sosial karena merasa memiliki status superior. Berdasarkan peraturan Hindia Belanda yang dikenal dengan *Inland-sche Gementee Ordonantie*, Kota Praja Madiun atau *Staads Gementee* Madiun resmi dibentuk pada 20 Juni 1918 sesuai *Staatsblaad* tahun 1918 nomor 326 ([madiunkota.go.id](http://madiunkota.go.id)).

### **2.1.2 Kondisi Geografis Kota Madiun**

Kota Madiun merupakan salah satu kota dari 38 kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Luas dari wilayah Kota Madiun sekitar 33,23 km<sup>2</sup> dan secara geografis sendiri berada di antara 7'-8' Lintang Selatan serta di antara 111'-112' Bujur Timur. Kota Madiun sendiri merupakan kota terluas ke empat di

Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kota Madiun sendiri mempunyai tiga kecamatan yang mana di dalam setiap kecamatannya terdapat sembilan kelurahan yang apabila dijumlahkan seluruhnya adalah 27 kelurahan.

**Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun**

| No | Kecamatan  | Jumlah Kelurahan | Luas Kecamatan        |
|----|------------|------------------|-----------------------|
| 1  | Kartoharjo | 9                | 10,54 km <sup>2</sup> |
| 2  | Manguharjo | 9                | 12,46 km <sup>2</sup> |
| 3  | Taman      | 9                | 10,73 km <sup>2</sup> |

Sumber : *madiunkota.bps.go.id*

Berdasarkan *website* resmi *madiunkota.go.id* secara letak geografis, Kota Madiun dapat dikatakan memiliki potensi yang strategis karena Kota Madiun berada di jalur akses daerah yang mana merupakan menjadi penghubung antara kota lainnya yakni Surabaya – Madiun – Solo – Jakarta, Surabaya – Madiun – Solo – Bandung. Disamping mempunyai letak yang strategis, Kota Madiun tentu berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. Berikut tabel yang menunjukkan batas wilayah atau administrasi Kota Madiun.

**Tabel 2. 2 Batas Wilayah atau Administrasi Kota Madiun**

| No | Batas Wilayah   | Keterangan                         |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 1  | Sebelah Utara   | Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun |
| 2  | Sebelah Selatan | Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun  |
| 3  | Sebelah Barat   | Kecamatan Jiwan, Kabupaten Magetan |
| 4  | Sebelah Timur   | Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun  |

Sumber : *madiunkota.go.id*

### 2.1.3 Kondisi Demografis Kota Madiun

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun per tahun 2023 sebanyak 202.544 jiwa yang apabila dirinci terdapat sebanyak 99.319 jiwa penduduk laki-laki dan 103.225 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang paling banyak ditempati adalah

kecamatan taman sejumlah 86.149 jiwa. Berikut rincian data jumlah penduduk Kota Madiun :

**Tabel 2. 3 Data Jumlah Penduduk Kota Madiun Tahun 2023**

| Kecamatan          | Laki-laki |        | Perempuan |        | Total   |        |
|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
|                    | Jumlah    | %      | Jumlah    | %      | Jumlah  | %      |
| <b>Kartoharjo</b>  | 27.420    | 27,61  | 28.616    | 27,72  | 56.036  | 27,67  |
| <b>Manguharjo</b>  | 29.624    | 29,83  | 30.735    | 29,77  | 50.359  | 29,80  |
| <b>Taman</b>       | 42.275    | 42,56  | 43.874    | 42,50  | 86.149  | 42,52  |
| <b>Kota Madiun</b> | 99.319    | 100,00 | 103.225   | 100,00 | 202.544 | 100,00 |

Sumber : *capil.madiunkota.go.id*

Kemudian, apabila dilihat dari segi tingkat kepadatan penduduk, menurut data yang ada pada tahun 2023 di Kota Madiun Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling besar adalah Kecamatan Taman sebesar 6.194 jiwa/km<sup>2</sup>, disusul dengan Kecamatan Manguharjo sebesar 6.012 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Kartoharjo sebesar 5.222 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berikut adalah rincian data tingkat kepadatan penduduk di Kota Madiun

**Tabel 2. 4 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Madiun Tahun 2023**

| Kecamatan          | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| (1)                | (2)                    | (3)                             | (4)=(2)=(3)                                |
| <b>Kartoharjo</b>  | 56.036                 | 10,73                           | 5.222                                      |
| <b>Manguharjo</b>  | 60.359                 | 10,04                           | 60.012                                     |
| <b>Taman</b>       | 86.544                 | 12,46                           | 6.914                                      |
| <b>Kota Madiun</b> | 202.544                | 33,23                           | 6.095                                      |

Sumber : *capil.madiunkota.go.id*

#### 2.1.4 Kondisi Ekonomi Kota Madiun

Perekonomian di Kota Madiun adalah sektor yang sangat berpengaruh pada kemajuan pembangunan perkotaan di Kota Madiun. Dalam hal sektor ekonomi,

menurut data laporan hasil kinerja pemerintah Kota Madiun, pada tahun 2023 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku sebesar 17,256 triliun rupiah yang mana meningkat 9,09% dibanding tahun sebelumnya yaitu 15,818 triliun rupiah. Ekonomi Kota Madiun tumbuh sebesar 5,8% yang mana melebihi angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat 4,95% dan nasional mencapai 5,05%. Berikut pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir Kota Madiun :

**Tabel 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku**

| Tahun | PDRB (Rp Triliun) | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|-------------------|-------------------------|
| 2019  | 15,818            | 5,69                    |
| 2020  | 15,267            | -3,39                   |
| 2021  | 15,981            | 4,73                    |
| 2022  | 16,876            | 5,52                    |
| 2023  | 17,256            | 5,80                    |

Sumber : *pemerintahan.madiunkota.go.id*

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2019-2023, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 tersebut, PDRB menurun sebesar -3,39%. Namun, Kota Madiun dapat memulihkan kondisi ekonominya di tahun 2021 dengan pertumbuhan positif yang signifikan.

Apabila dilihat dari struktur perekonomian, perekonomian di Kota Madiun terlihat cukup beragam dengan sektor perdagangan, informasi dan industri yang menjadi unsur paling dominan. Sektor-sektor yang ada mempunyai peran penting dalam mendukung kesejahteraan Kota Madiun dan membuka peluang investasi lebih lanjut. Berikut struktur perekonomian Kota Madiun berdasarkan Lapangan Usaha tahun 2023:

**Tabel 2. 6 Struktur Perekonomian Berdasarkan  
Lapangan Usaha Kota Madiun Tahun 2023**

| Lapangan Usaha                                             | Kontribusi (%) |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 26,71          |
| Informasi dan Komunikasai                                  | 15,25          |
| Industri Pengolahan                                        | 13,56          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                 | 9,67           |
| Jasa Pendidikan                                            | 6,97           |
| Konstruksi                                                 | 5,83           |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                       | 5,22           |
| Lapangan Usaha Lainnya                                     | <5             |

Sumber : *pemerintahan.madiunkota.go.id*

Dari tabel di atas menunjukkan sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Madiun yang mencapai lebih dari 26%. Hal ini menandakan bahwasannya sektor perdagangan menjadi pilar utama dalam perekonomian Kota Madiun. Sektor yang berkontribusi besar lainnya disusul oleh sektor informasi dan komunikasi dilanjut dengan sektor industri pengolahan.

#### **2.1.5 Pemerintahan Kota Madiun**

Kota Madiun adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai peran strategis dalam sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai daerah otonom, Kota Madiun dipimpin oleh seorang Wali Kota yang mana bertanggung jawab atas segala jalannya roda pemerintahan serta pembangunan daerah. Sejak beberapa periode terakhir, Kota Madiun telah dipimpin oleh sejumlah wali kota dengan berbagai jenis kebijakan. Pemimpin saat ini adalah Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd. yang menjabat sejak tahun 2019. Sebelum beliau, Kota Madiun telah dipimpin oleh beberapa wali kota lainnya, diantaranya:

**Tabel 2. 7 Daftar Wali Kota Madiun**

| No | Nama Wali Kota                      | Periode                   |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Imam Soenardji                      | 13-11-1968 s/d 19-01-1974 |
| 2  | Achmad Dawaki                       | 19-01-1974 s/d 20-01-1979 |
| 3  | Marsoedi                            | 20-01-1979 s/d 20-01-1989 |
| 4  | Masdra M. Jasin                     | 20-01-1989 s/d 20-01-1994 |
| 5  | Bambang Pamoedjo                    | 20-01-1994 s/d 20-01-1999 |
| 6  | H. Achmad Ali                       | 20-01-1999 s/d 20-01-2004 |
| 7  | Koko Raya, S.H., M.Hum              | 29-04-2004 s/d 29-04-2009 |
| 8  | H. Bambang Irianto, S.H., M.M       | 29-04-2009 s/d 29-04-2019 |
| 9  | Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd | 29-04-2019 s/d Sekarang   |

Sumber : *madiunkota.go.id*

Setiap wali kota memiliki visi dan misi yang berbeda dalam membangun Kota Madiun, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik hingga pengembangan ekonomi daerah. Wali Kota Madiun yang menjabat sekarang tentu mempunyai visi dan misi untuk pemerintahannya dalam satu periode kepemimpinan. Visi adalah suatu rumusan terkait kondisi atau keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode mengenai perencanaan pembangunan daerah. Kota Madiun memiliki visi, yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”. Dalam visi tersebut terdapat tiga poin penting, yakni bersih, berwibawa dan sejahtera. Bersih pada konteks ini bermakna bahwasannya Kota Madiun menginginkan pemerintahannya terhindar dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang disertai dengan pelayanan prima dengan didukung tentunya oleh sumber daya manusia berupa aparatur yang profesional serta berlakunya prinsip *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabel.

Poin berwibawa pada visi tersebut tentu juga mempunyai makna bahwasannya dalam keberjalanan roda pemerintahan, Pemerintah Kota Madiun kedepannya berpegang prinsip untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat,

selalu mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan terdapat kepemimpinan publik yang dihormati guna meningkatkan kinerja pegawai. Kemudian, yang terakhir adalah sejahtera. Sejahtera yang dimaksud dalam konteks ini adalah menekankan pada kondisi masyarakat Kota Madiun yang nantinya diharapkan dapat menjalani kehidupan individu atau pun kelompok dengan layak, produktif, sehat serta terdapat ketentraman lahir dan batin yang tidak dibelenggu oleh rasa takut.

Dari visi tersebut, misi yang akan dijalankan untuk membangun Kota Madiun adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun, mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut dirangkum dalam “Panca Karya” yang mana kata tersebut erat kaitannya dengan “PENDEKAR”. Panca karya tersebut diakronimkan menjadi PENDEKAR itu meliputi, Pintar, Melayani, Membangun, Peduli, Terbuka dan Karismatik.

Kemudian untuk menjalankan pemerintah daerah, Kota Madiun mempunyai 59 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi dalam berbagai bidang, seperti administrasi, keuangan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Berikut adalah daftar OPD di Kota Madiun



**Tabel 2. 8 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kota Madiun**

| No | Nama Organisasi Perangkat Daerah                                |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia          |
| 2  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)                |
| 3  | Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)                           |
| 4  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)                      |
| 5  | Badan Pendapatan Daerah                                         |
| 6  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) |
| 7  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga          |
| 8  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                         |
| 9  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                            |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup                                          |
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu          |
| 15 | Dinas Pendidikan                                                |
| 16 | Dinas Perdagangan                                               |
| 17 | Dinas Perhubungan                                               |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                |
| 19 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                   |
| 20 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak      |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah           |
| 22 | Inspektorat Kota Madiun                                         |
| 23 | Kecamatan Kartoharjo                                            |
| 24 | Kecamatan Manguharjo                                            |
| 25 | Kecamatan Taman                                                 |
| 26 | Kelurahan Banjarejo                                             |
| 27 | Kelurahan Demangan                                              |
| 28 | Kelurahan Josenan                                               |
| 29 | Kelurahan Kanigoro                                              |
| 30 | Kelurahan Kartoharjo                                            |
| 31 | Kelurahan Kejuron                                               |
| 32 | Kelurahan Kelun                                                 |
| 33 | Kelurahan Klegen                                                |
| 34 | Kelurahan Kuncen                                                |
| 35 | Kelurahan Madiun Lor                                            |
| 36 | Kelurahan Manguharjo                                            |
| 37 | Kelurahan Manisrejo                                             |
| 38 | Kelurahan Mojorejo                                              |
| 39 | Kelurahan Nambangan Kidul                                       |
| 40 | Kelurahan Nambangan Lor                                         |
| 41 | Kelurahan Ngegong                                               |
| 42 | Kelurahan Oro-oro Ombo                                          |

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 43 | Kelurahan Pandean                                |
| 44 | Kelurahan Pangongangan                           |
| 45 | Kelurahan Patihan                                |
| 46 | Kelurahan Pilangbango                            |
| 47 | Kelurahan Rejomulyo                              |
| 48 | Kelurahan Sogaten                                |
| 49 | Kelurahan Sukosari                               |
| 50 | Kelurahan Taman                                  |
| 51 | Kelurahan Taman                                  |
| 52 | Kelurahan Winongo                                |
| 53 | PDAM Kota Madiun                                 |
| 54 | PD Aneka Usaha                                   |
| 55 | PD BPR Bank Daerah                               |
| 56 | RSUD Sogaten Kota Madiun                         |
| 57 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 58 | Sekretariat Daerah Kota Madiun                   |
| 59 | Sekretariat DPRD Kota Madiun                     |

Sumber : *madiunkota.go.id*

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun**

### **2.2.1 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun**

Berdasarkan informasi dari *website* resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Madiun, pada awalnya menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Madiun dan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan bagian dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Kemudian sehubungan optimalisasi tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Madiun terpisah menjadi dua dinas. Dinas tersebut terpisah menjadi dua, yaitu Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun. Setelah Perda

tersebut efektif pada tahun 2017, Dinas Perhubungan tetap berlokasi di Jalan Hayam Wuruk Nomor 62, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika berlokasi di Jalan Pahlawan Nomor 37. Diskominfo Kota Madiun kemudian berpindah lokasi kembali ke Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32 pada tahun 2019 hingga sekarang.

### **2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mengalami restruktur organisasi dengan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2016. Melalui perda tersebut terdapat perubahan yang terjadi pada Diskominfo terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang mana menurut peraturan terbaru berpedoman pada Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dinas Kominfo adalah dinas dengan tipe B yang mana didalamnya terdapat unsur pimpinan, unsur pembantu dan unsur pelaksana. Pertama, unsur pimpinan yang dimaksud disini adalah kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, evaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan, evaluasi serta bimbingan teknis pada bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Sementara itu, unsur pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sekretariat. Sekretariat pada dinas ini bertugas untuk melakukan kebijakan pelayanan terkait administrasi terhadap semua elemen dilingkungan dinas yang mana didalamnya terdapat perencanaan, pengelolaan, administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Sementara itu, di dalam unsur pelaksana terdapat tiga bidang yang diantaranya adalah bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang pengelolaan statistik dan persandian.

Ketiga bidang tersebut memiliki tugas dalam hal melakukan persiapan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi. Selain itu, ketiga bidang juga menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.